

Collaborative Governance Dalam Penanganan Pandemi Covid 19 Di Kota Surabaya (Study Kasus Di Kelurahan Kandangan

by Sri Juni Woro Astuti

Submission date: 02-May-2023 02:46PM (UTC+0700)

Submission ID: 2081859771

File name: borative_govt_ddlm_penanganan_pandemi_-_Sri_Juni_Woro_Astuti.pdf (229.43K)

Word count: 4125

Character count: 27529

**COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENANGANAN
PANDEMI COVID 19 DI KOTA SURABAYA
(Study Kasus Di Kelurahan Kandangan)**

Aditya Saputra, Sri Juni Woro Astuti

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Wijaya Putra Surabaya
saputraaditya033@gmail.com¹, srijuniworoastuti@uwp.ac.id²

Abstrak

Collaborative Governance Dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Di Kota Surabaya (Study Kasus Di Kelurahan Kandangan) Penelitian ini bertujuan untuk medeskripsikan keberhasilan pelaksanaan Collaborative Governance Dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Di Kota Surabaya (Study Kasus Di Kelurahan Kandangan). Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Untuk menjamin validitas data menggunakan triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Collaborative Governance dalam penanganan Covid-19 di Surabaya khususnya di Kelurahan Kandangan sudah baik, hanya saja Pemerintah hendaknya memberikan bantuan secara merata kepada masyarakat dan pengawasan lebih ketat dan tidak ada kecurangan dalam penyaluran bantuan, sehingga penyalurannya merata dan masyarakat mendapatkan haknya.

Kata kunci : Collaborative Governance, Penanganan Covid-19

Abstarct

Collaborative **Governance in Handling the** Covid-19 Pandemic in Surabaya City (Case Study in Kandangan Village) This study aims to describe the successful implementation of Collaborative Governance in **H**andling the Covid-19 Pandemic in the City of Surabaya (Case Study in Kandangan Village). This type of research is descriptive with a qualitative approach. Data collection techniques using interviews and documentation. To ensure the validity of the data using source triangulation. The results of the study show that Collaborative Governance in handling Covid-19 in Surabaya, especially in Kandangan Village, is good, it's just that the Government provides assistance evenly to the community and supervision is tighter and there are no difficulties in providing assistance, so that it is evenly distributed and the community gets their rights.

Keywords: Collaborative Governance, handling Covid-19

Pendahuluan

Covid-19 menjadi pandemi global setelah diumumkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organization (WHO), dan dengan penyebarannya yang cepat, Covid-19 telah menjadi masalah besar di seluruh dunia. Tak terkecuali Indonesia, karena jumlah orang yang terinfeksi Covid-19 atau virus corona semakin bertambah setiap harinya. Pemerintah selalu mengupdate data Covid-19 di Indonesia, dan seiring bertambahnya kasus tersebut, jumlah pasien Covid-19 pun bertambah. Pemerintah juga menghadapi kebingungan dan dilema, karena tidak hanya bisa mempertimbangkan satu sektor saja, tetapi harus memprioritaskan berbagai sektor yang terkena dampak dan harus dibenahi terlebih dahulu. Misalnya, prioritas moneter harus diberikan pada kesehatan atau ekonomi, dan sebaliknya, dan pemerintah harus segera menentukannya. Dalam rangka untuk lebih mengefektifkan penanganan pandemic diperlukan penerapan konsep *Collaborative Governance* yang melibatkan berbagai pihak atau stakeholder karena tanggung jawab mengatasi pandemic bukan hanya di pundak pemerintah semata tetapi juga dari seluruh elemen bangsa. Collaborative governance merupakan suatu bentuk kerjasama dan komitmen bersama, yang secara langsung maupun tidak langsung melibatkan lembaga pemerintah, non pemerintah dan masyarakat, dimana aktor – aktor yang berkolaborasi tersebut akan mendapatkan akibat dan manfaat dari suatu kolaborasi dan akan berdampak pada penyelenggaraan pemerintahan.

Dari sisi konsep pemerintahan, pemerintah tidak perlu menyelesaikan masalah publik dengan sendirinya, tetapi dapat melibatkan partai politik lain atau lembaga swadaya masyarakat melalui kebijakan untuk meningkatkan kepuasan pelayanan publik. Demikian pula dalam persoalan wabah pandemi Covid-19 di Surabaya, bukan hanya urusan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, namun ini persoalan bersama. Karenanya, pemerintah kota Surabaya mengajak semua pihak untuk bergandeng tangan melawan virus yang terbilang baru ini. Wujud kebersamaan melawan Covid-19 sudah terlihat di Kota Surabaya. Adanya tata kelola kolaboratif bertujuan untuk meningkatkan kerjasama antar pemangku kepentingan yaitu sektor publik, swasta dan masyarakat dalam pengelolaan pemerintahan, serta upaya dalam mengelola masalah publik dan tanggapan pemerintah. Sebagai bentuk respon masyarakat terhadap pandemi Covid19, Dalam merespon laju penyebaran virus covid-19 yang dari hari kehari kian meningkat, dimana Kota Surabaya termasuk kota terbanyak yang menyumbangkan kasus positif covid-19 untuk Provinsi Jawa Timur. Lonjakan kasus ini terjadi ketika pemerintah Kota Surabaya mulai memberlakukan new normal dan pada pemberlakuan era tersebut masyarakat dinilai masih memiliki kesadaran yang rendah untuk

menjalankan protokol kesehatan covid-19. Oleh sebab itu pemerintah Kota Surabaya, berupaya mengambil berbagai tindakan dalam rangka menekan jumlah penyebaran kasus Covid-19 di Kota Surabaya. Dalam melakukan kebijakan yang bertujuan menanggulangi kasus penyebaran kasus ini pemerintah Kota Surabaya menggunakan pendekatan *collaborative governance*.

³ Keterlibatan sektor publik (pemerintah), sektor swasta dan masyarakat sebagai pemangku kepentingan akan membuat sektor publik lebih efektif dan efisien. Pemerintah kota Surabaya telah melakukan upaya-upaya agar terbebas dari serangan Kvirus Covid-19. Pemerintah secara tegas menyampaikan upaya inovatif tangani Covid-19, “harus menyampaikan dan memastikan bahwa gugus tugas kota surabaya bersama-sama gugus tugas kabupaten/kota se Jawa Timur dengan dukungan berbagai pihak akan terus bekerja keras dengan berbagai upaya inovatif baik dalam menangani Covid-19 sampai berakhir. Secara konstitusional telah diatur tugas dan peran pemerintah dalam hal ini sebagai penyelenggara pelayanan perlindungan kesehatan. Akan tetapi mekanisme dan proses yang normative pasti akan sulit menjawab persoalan tersebut. Semua pihak mulai dari pemerintah, lembaga non pemerintah baik privat maupun masyarakat harus saling berkolaborasi untuk menghadapi kasus covid-19, perlu berbagai pendekatan dari berbagai pihak untuk benar-benar memberikan keadilan dan kenyamanan bagi masyarakat yang mengalami permasalahan sosial. Konsep dan model Collaborative Governance merupakan salah satu alternative saat ini yang memungkinkan untuk memberikan jawaban dalam memberikan pelayanan menghadapi permasalahan penanganan covid-19.

Collaborative governance menurut Ansell dan Gash (Ansell & Gash, 2008) adalah “*A governing association in which one or greater public groups immediately engage non-state stakeholders in a collective decision- making technique this is formal, consensus-oriented, and deliberative and that objectives to make or implement public coverage or control public applications or assets*” Kemudian menurut (Emerson, Nabatchi, & Balogh: 2012) menyatakan *collaborative governance which in volves many parties, each in authorities and personal sector, is one the approaches to find collective solutions to common problems. Nonetheless, to achieve its goals, collaborative Governance must be based on a grand design or grasp plan*. Berdasarkan konsep tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan konsep Collaborative Governance dengan pendekatan pentahelix yang dilakukan oleh pemerintah Kota Surabaya dengan melibatkan banyak aktor dalam upaya penanggulangan penyebaran virus covid-19 di Kota Surabaya.

Kerangka Teori

Collaborative Governance

Menurut para ahli yang dikemukakan oleh *Cordery, (2004);Harman et al.,(2002)* bahwa *Collaborative Governance* merupakan proses yang ada di dalamnya melibatkan sebuah stakeholder yang saling berkaitan untuk mendorong kepentingan masing masing instansi dalam upaya mencapai tujuan bersama. Sedangkan menurut Ansell dan Gash (2007) *Collaborative Governance* dikatakan sebagai bentuk peraturan yang mengatur satu atau lebih melibatkan lembaga publik yang secara langsung terlibat dengan pemangku kepentingan non publik dalam membentuk sebuah proses pengambilan keputusan yang kolektif dalam bersifat formal, berorientasi konsensus, dan dengan cara bermusyawarah dengan sebuah tujuan mengimplementasikan kebijakan serta mengelola program sebuah aset.

Model Collaborative Governance

Model Collaborative Governance menurut Ansel dan Gash (2007) terdiri dari beberapa tahapan yaitu:

1. Kondisi awal, keputusan untuk melakukan praktek kolaborasi, kerjasama antara para pemangku kepentingan, antara lembaga, pemegang saham. Stakeholder dalam sejarahnya menghadapi satu masalah sehingga berinisiatif untuk melakukan kolaboratif. Para pemangku kepentingan memiliki visi bersama yang ingin dicapai melalui kolaborasi dan sejarah masa lalu saling bekerjasama. Masalah yang dialami yaitu ketidakseimbangan sumber daya dari berbagai pemangku kepentingan berkolaborasi antara pemegang peran.
 - a. Ketidakseimbangan Sumber Daya, dalam tata kelola kolaboratif pemangku kepentingan, jika stok tidak memiliki kemampuan dan sumber daya untuk berinteraksi dengan pemangku kepentingan, akan ada kerja sama pemerintah, dan kerja sama ini mudah dimanipulasi oleh peserta yang lebih kuat.
 - b. Intensif untuk Berpartisipasi, pemangku kepentingan telah meningkatkan niat mereka untuk meningkatkan partisipasi sambil mempertahankan pendekatan kolaboratif yang dibutuhkan salah satu pihak.
 - c. Ketergantungan dan kerjasama, tata kelola kolaboratif dalam prosesnya, berhasil atau tidaknya, tergantung pada peserta yang terlibat, karena para peserta saling bergantung.

2. Kelembagaan, pemimpin yang memposisikan diri sebagai pemangku kepentingan dan membuat komitmen selama periode waktu tertentu dapat menjadi rentan dalam kerjasama.

Tabel 1. Struktur kelembagaan Satgas Covid-19 di Kelurahan Kandangan

SATGAS WANI SEHAT	<ol style="list-style-type: none">1. Melakukan pemantauan terhadap pasien ODP,PDP,OTG2. Melakukan pendataan terhadap warga yang kotak dengan pasien3. Melaporkan kepada puskesmas,kelurahan dan kecamatan bila adaarganya yang terindikasi gejala Covid
SATGAS WANI SEJAHTERA	<ol style="list-style-type: none">1. Mengidentifikasi kebutuhan pemakanan pasien ODP,PDP,OTG dan konfirm rawat jalan dengan kriteria yang sudah ditentukan2. Mengidentifikasi warga terdampak yang tidak mampu3. Melakukan upaya penanganan terhadap warga terdampak secara gotong royong4. Memastikan bantuan sosial pemerintah sampai ke penerima
SATGAS WANI JOGO	<ol style="list-style-type: none">1. Pembatasan dan pencatatan orang dan kendaraan yang keluar masuk2. Membuat jadwal jaga kampung3. Memantau dan memastikan warga yang isolasi mandiri untuk tidak keluar4. Memastikan kegiatan sosial dan keamanan dilakukan5. Melaksanakan penyemprotan disinfektan
SATGAS WANI NGANDANI	<ol style="list-style-type: none">1. Memberikan informasi dan edukasi kepada warga terkait pencegahan dan penanganan covid2. Melakukan komunikasi dengan berbagai pihak terkait Covid3. Melaporkan perkembangan penanganan ODP,PDP,OTG dan konfirm rawat jalan melalui aplikasi lawan COVID19.SURABAYA.GO.ID

3. Kepemimpinan dalam hal ini, kepemimpinan bertujuan untuk mengajak, melindungi, dan memelihara hubungan antar pemangku kepentingan untuk mencapai tata kelola yang kolaboratif. Dalam kepemimpinan sebagai pemimpin akan mematuhi kondisi suatu tempat sehingga ketika pemimpin bekerja sama. Langkah taktis yang dilakukan oleh Kepala Kelurahan cukup cepat dan tepat dengan mengarahkan penyediaan fasilitas yang memadai serta tenaga medis yang kompeten hingga memberdayakan masyarakat

sehingga mampu menekan penyebaran COVID-19. Gaya kepemimpinan yang ditunjukkannya pun cukup menarik yaitu melalui pendekatan gaya kepemimpinan partisipatif dan gaya kepemimpinan transformasional dalam menghadapi pandemi ini. Dimana gaya kepemimpinan tersebut ditunjukkan dengan kepemimpinan yang mampu mendorong pemikiran inovatif serta menggunakan nilai-nilai moral para pengikutnya sebagai hal penting untuk meningkatkan kesadaran mereka tentang suatu permasalahan.

4. Proses kolaboratif, dalam prosesnya collaboratif ada 3 yaitu:
 - a. Masalah peraturan
 - b. Arah peraturan
 - c. Pelaksanaan (*gray* dalam *ansell & gash*, 2007).
 - d. Terdapat perubahan yang baik dalam bentuk model kolaborasi, dan berperan penting dalam mencapai hasil positif dalam kolaborasi, yaitu komunikasi, kepercayaan, komitmen dan pemahaman dalam komunikasi dan kolaborasi tatap muka.

Indikator Keberhasilan Kolaborasi

Dimensi Kolaboratif Kondisi Awal

Dimensi kolaboratif dari kondisi awal menjadi awal munculnya Covid19 di Indonesia. Melaksanakan kerjasama antara pemerintah dan pemangku kepentingan. Para peserta yang terlibat memiliki tujuan yang ingin dicapai melalui kerjasama. Dalam dimensi ini, kita akan membahas pertimbangan untuk mengelola ini dan tujuannya, pihak yang terlibat dalam penanganan Covid19, serta peran pemerintah dan pemangku kepentingan dalam praktik kolaboratif. Berdasarkan penelitian Roni Ekha Putera, Tengku Rika Valentinab, Putri Febri Wialdic, Nia Audina menjelaskan bahwa pada penghujung tahun 2019 dunia digemparkan oleh munculnya kasus penyakit baru, kemudian virus ini terus berkembang pada banyak negara dan juga banyak memakan korban meninggal disetiap negara, termasuk Indonesia. Hingga bulan Oktober 2020 pemerintah Indonesia telah merilis sebanyak 324.658 ribu jiwa kasus terkonfirmasi, 251 ribu jiwa sembuh, dan 11.765 ribu jiwa kasus meninggal (Covid19.go.id) Agustino berpendapat dalam penelitiannya menyatakan penanganan Pemerintah Indonesia dalam penyebaran virus ini dinilai tidak responsif dan keliru jika dibandingkan dengan negara-negara lain (Leo,Agustino:2020).

Lonjakan kasus ini terjadi ketika pemerintah mulai memberlakukan new normal dan pada pemberlakuan era tersebut masyarakat dinilai masih memiliki kesadaran yang rendah untuk menjalankan protokol kesehatan covid-19. Oleh sebab itu Pemerintah Kota berupaya

mengambil berbagai tindakan dalam rangka menekan jumlah penyebaran kasus covid-19. Dalam melakukan kebijakan yang bertujuan menanggulangi kasus penyebaran kasus ini Pemerintah Kota menggunakan pendekatan pentahelix. Pendekatan pentahelix disini maksudnya adalah dalam rangka menyelesaikan permasalahan ini beberapa stakeholder saling berkolaborasi, dimana terdiri dari pemerintah, akademisi, media massa, swasta, dan masyarakat. Model pentahelix merupakan wujud multikulturalisme dalam menangani wabah, dengan begitu dalam penanganan wabah ini akan membuat pengawasan kebijakan atau tindakan pemerintah dalam penanggulangan covid-19 semakin baik.

Konsep tata kelola kolaboratif itu sendiri mencakup partisipasi setiap organisasi yang menginisiasi upaya dan inisiatif kolaboratif berupa masukan dari masing-masing pemangku kepentingan untuk menentukan/menetapkan tujuan terkait dengan tujuan kolaboratif, mengevaluasi hasil, memicu perubahan, dan lain-lain (Sudalmo: 2017). Menurut (Ansell dan Gash 2007), tata kelola kolaboratif adalah "pengaturan tata kelola di mana satu atau lebih lembaga publik secara langsung melibatkan pemangku kepentingan non-negara dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang formal, berorientasi konsensus, dan disengaja. Dalam membuat publik atau mengimplementasikannya. Kebijakan atau rencana pengelolaan atau aset publik"

Dimensi Kolaboratif Kelembagaan

Dimensi pemimpin kolaboratif yang memposisikan diri sebagai pemangku kepentingan dan menjaga kerukunan antar peserta yang terlibat dalam pengelolaan kolaboratif Covid-19 memprediksi keterikatan dalam waktu pelaksanaan akan semakin rapuh dalam kerjasamanya. Dimensi ini akan membahas bagaimana implementasi di berbagai wilayah Indonesia menjelaskan pengelolaan dan membahas regulasi dengan pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengelolaannya. "Kurangya kesadaran masyarakat dalam mentaati protokol kesehatan. Pemerintah dituntut bekerja lebih keras dalam hal mengkampanyekan cara mencegah Covid-19 dan protokol kesehatan kepada masyarakat. Pemerintah harus bergandengan tangan dengan semua pihak yang berperan diwilayah itu seperti TNI dan Polri serta Media Massa. TNI dan Polri harus mengambil bagian penting dalam hal mengkompanyeken potokol kesehatan serta menertibkan masyarakat jika melanggar protokol kesehatan dengan tagas, karna dalam hal ini Virus Corana bisa tertular kepada siapapun disebabkan karna tidak memakai masker, jaga jarak serta tidak berkerumunan. Serta tak lupa media masa sebagai alat edukasi kepada masyarakat

memberikan edukasi tentang banyanya tidak mamatuhi protokol kesehatan serta cara mencegah Covid-19. Faktor kepatuhan, kedisiplinan dan kebiasaan merupakan hal yang penting harus dilakukan, peran TNI dan Polri serta Media Massa dalam mendisiplinkan masyarakat serta memberikan edukasi merupakan poin penting dalam memberikan edukasi terhadap masyarakat”.

Dimensi Kolaboratif Kepemimpinan

Dimensi kepemimpinan kolaboratif bertujuan untuk mengajak dan menjaga hubungan antar pemangku kepentingan dalam pelaksanaan praktik tata kelola kolaboratif. Aspek kepemimpinan yang dibahas adalah tentang peserta utama di departemen kepemimpinan atau manajemen, penjelasan pembagian tugas untuk masing-masing peserta, dan terakhir mengacu pada apa yang terjadi antara peserta dalam praktik tata kelola kolaboratif (rapat, rencana, atau panggilan) Koordinasi.

Dimensi Proses Kolaborasi

Dimensi tata kelola kolaboratif dalam peran Anda mencakup lima poin, yaitu, dialog tatap muka, pembangunan kepercayaan, komitmen terhadap proses (komitmen bersama), pemahaman bersama (pemahaman bersama), dan hasil antara (Realisasi hasil) . Dimensi ini akan membahas dialog tatap muka untuk mencapai tujuan pemangku kepentingan terkait, memecahkan masalah implementasi, dan tingkat kepercayaan partisipasi manajemen, dan akan membahas hubungan antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat.

Metode Penelitian

Penelitian bisa dikatakan berawal dari minat serta ketertarikan yang ada dalam diri seseorang dalam memahami suatu fenomena tertentu yang kemudian membutuhkan proses sehingga berkembang menjadi ide, teori, dan konsep. Untuk mewujudkan penelitian yang berawal dari minat tersebut dilakukan cara untuk mewujudkannya yaitu dengan memilih metode penelitian yang cocok dengan tujuan dari peneliti tersebut. Metode penelitian dalam hal ini bertujuan untuk mewujudkan permasalahan yang diangkat dalam penelitian dengan tujuan mencari jawaban dan solusi agar dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut I Made Winartha (2006) metode analisis deskriptif kualitatif adalah menganalisis, menggambarkan, dan Meringkas berbagai kondisi dan situasi dari berbagai data

yang dikumpulkan dalam bentuk wawancara atau observasi, dan mengamati masalah penelitian yang terjadi di tempat lapangan.

Kerangka Berpikir

Mengacu kepada konsep *collaborative governance*, bahwa *collaborative governance*, upaya harus dilakukan untuk menggabungkan semua sektor pemerintah dan non-pemerintah untuk mengelola, mengatur dan mengatur urusan bersama untuk mencapai hasil yang lebih efektif dan efisien. Collaborative governance, terus berkembang dalam pemerintahan karena adanya kompleksitas dan saling ketergantungan antar institusi, dimana penanganan suatu masalah publik sangat sulit yang dilakukan oleh satu institusi pemerintah, maka sangat diperlukan kolaborasi agar masalah publik tersebut dapat diatasi dengan jauh lebih baik. Menurut pendendapat Ricardo S. Morse & John B. Stephens dalam jurnalnya yang berjudul Teaching Collaborative Governance: Phases, Competencies, and Case-Based Learning (2012: 565-583) terdiri dari Assessment, Initiation, Deliberation, dan Implementation.

Hasil dan Pembahasan

Keberhasilan Collaborative Governance dalam Penanganan Pandemi Covid 19 di Kota Surabaya (study kasus di kelurahan kandangan)

Dari hasil wawancara maka akan dirangkum beberapa Keberhasilan pelaksanaan Collaborative Governance dalam Penanganan Pandemi Covid 19 di Kota Surabaya (study kasus di kelurahan kandangan), disini penulis akan menjelaskan tentang beberapa dimensi sesuai dengan dimensi yang di butuhkan yang pertama yaitu:

Komunikasi (*Face to face*)

Tata kelola kolaboratif mengandalkan tatap muka antar pemangku kepentingan sebagai proses konsensus dan memperhatikan keramahan. Komunikasi langsung antara peserta untuk mengidentifikasi peluang keuntungan. Tatap muka adalah bagian dari kepercayaan pemangku kepentingan saat mengimplementasikan rencana yang telah ditetapkan bersama.

Kepercayaan

Bentuk kepercayaan berarti bahwa dalam hubungan sosial yang dibangun di atas rasa percaya, pihak lain akan melakukan apa yang diharapkan dan akan selalu bertindak dalam mode tindakan yang saling mendukung, setidaknya orang lain tidak akan terlibat dalam

perilaku yang merugikan. Kepercayaan adalah sikap saling percaya, solidaritas dan kemajuan bersama dalam masyarakat.

Komitmen

Salah satu upaya untuk menangani di wilayah Kelurahan Kandangan adalah membutuhkan komitmen dari pemerintah dan di luar pemerintah, seperti pemangku adat atau masyarakat sekitar. Penanganan Covid-19 harus terus dilakukan dan terus dioptimalkan untuk seluruh warga. Budaya gotong royong harus tetap dipertahankan dan harus selalu ada dalam semua realitas masyarakat.

Pemahaman

Memahami pengambilan keputusan bersama untuk mengatasi masalah dalam implementasi. Selama proses implementasi, sangat berguna untuk mengevaluasi pekerjaan yang dilakukan dalam proses kolaboratif. Menurut Winardi (2015), tuntutan dari lingkungan eksternal seperti wabah covid 19 ini menjadi beban bagi organisasi. Pencapaian tujuan organisasi akan sangat ditentukan oleh kemampuan organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Kemampuan dalam menjalankan tugas dan fungsi oleh organisasi inilah yang dikenal sebagai kapasitas organisasi. Kapasitas organisasi menurut Donahue dan Hackhauzer (2011), hanya dapat ditingkatkan dengan melakukan collaborative governance dan perlu perumusan aktivitas atau peran bagi setiap stakeholder dalam penanganan pandemic ini. Braid and Green (2008) menyatakan bahwa ada banyak pihak atau aktor diluar pemerintah yang memiliki kapasitas lebih dari yang dimiliki oleh pemerintah dalam hal ini penanganan covid 19, sehingga perlu bagi pemerintah tetap mengambil peran yaitu menjadi penengah dalam tata kelola pemerintahan dalam penanganan bencana ini.

Keterbatasan kapasitas melalui kolaborasi dalam konteks penanganan pandemi covid 19 di Kelurahan Kandangan yang dilakukan bersama dengan pemerintahan Kota memiliki beberapa alasan. Pertama, Sebagai garda terdepan yang berhadapan dengan masyarakat, tentu pemerintah menjadi ujung tombak dalam penanganan covid-19. Kedua, Satgas Covid adalah sebuah pemerintahan terdepan yang memiliki tugas yaitu indigenous people yang terdiri dari TNI dan Polri, Satuan polisi Pamong Praja (Satpol PP). Dalam penanganan Covid-19 menerapkan kebijakan Physical distensing sebagai strategi dasar penanganan Covid-19 dengan menerapkan

- a. Gerakan memangkai masker dan mengempanyekan mewajibkan memakai masker diluar ruangan pabrik dan diluar rumah.
- b. Menggunakan rapit tes atau tes cepat untuk penelusuran kontak tracing dari khusus positif yang di rawat.
- c. Edukasi dan penyiapan isolasi mandiri pada sebagai hasil repit tes yang menunjukkan khusus negatif maupun hasil tes positif dari repit tes.
- d. Isolasi dirumah sakit dilakukan kala isolasi mandiri tidak mungkin dilakukan karena adanya tindakan klinis yang butuh layanan di rumah sakit.

Mekanisme yang dilakukan dalam penanganan Covid-19 yaitu mekanisme penanganan pra rumahsakit dilakukan dengan mengedukasi masyarakat seperti jaga jarak saat berkomunikasi tetap tinggal dalam rumah, memakai masker, isolasi mandiri dan melakukan PSBB. Dan selanjutnya mekanisme penanganan dirumah sakit itu mamaksimlkan pelayanan, dan memastikan pasien Covid-19 mendapatkan pelayanan terbaik dan perawat yang aman dari tertularnya Covid-19. Berdasarkan hasil peneliian yang diuraikan di atas maka dapat di interpretasikan alur proses kolaborasi di penanganan pandemi Covid-19 Kelurahan Kandangan Kecamatan Benowo kota Surabaya melibatkan Pemerintah, masyarakat, swasta. Proses Collaborative governance dapat diuraikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. Interpretasi

No	Dimensi Collaborative Governance	Keterangan/hasil
1	Face to face (Dialog)	Dalam dialog interaktif antara Kepala Kelurahan dengan Ketua RW/Ketua RT Se-Kelurahan Kandangan Kecamatan Benowo Kota Surabaya, Kepala Kelurahan menyampaikan betapa pentingnya peran Kelurahan dalam PPKM Mikro yakni membentuk Posko Kelurahan sebagai pusat kegiatan perencanaan, pemantauan, dan analisa situasi PPKM Mikro di Tingkat Kelurahan. Melakukan analisa terhadap laporan/data Posko Tingkat RW/RT. Memfasilitasi pembentukan Posko Siaga COVID-19 di tingkat RW maupun RT.

2	Kepercayaan	Perlu didorong perubahan perilaku masyarakat yang masih setengah atau tidak patuh protokol kesehatan dengan cara memberikan motivasi dari dalam dan luar. Motivasi dari luar dapat diberikan melalui pemberian insentif, hukuman, nasehat dan dorongan. Motivasi dari dalam diberikan dengan melakukan intervensi akan pemenuhan kebutuhan, kepentingan, kemanfaatan, dan mengajak pihak lain.
3	Komitmen	Upaya untuk menangani di wilayah Kelurahan Kandangan adalah membutuhkan komitmen dari pemerintah dan di luar pemerintah, seperti pemangku adat atau masyarakat sekitar. Penanganan Covid-19 harus terus dilakukan dan terus dioptimalkan untuk seluruh warga
4	Pemahaman	Misi Kelurahan adalah mensosialisasikan penanganan Covid-19 oleh pemerintah kota, serta membantu menjaga dan menyebarkan informasi kepada warga Kandangan dengan bantuan kepolisian, TNI, Satpol PP dan Linmas.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut: Collaborative Governance dalam penanganan Covid-19 Hasil observasi di Kelurahan Kandangan adalah melakukan sosialisasi penyebaran Covid-19 dan cara mencegah penularan Covid-19 dengan cara 5M (mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, memakai masker dan mengurangi mobilitas yang mana menghimbau masyarakat agar mengurangi aktivitas diluar rumah), memberikan bantuan, berupa makanan bagi warga atau masyarakat yang terinfeksi Covid-19 dan juga secara besar-besaran pemerintah memfasilitasi masyarakat untuk mendapatkan Vaksinasi tahap 1 dan 2 secara gratis.

Pemerintah juga sudah menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang akan berlaku mulai 28 April hingga 11 Mei atau 14 hari," *cnnindonesia.com* mengutip, Jumat (24 April 2020). PPKM Jawa - Bali telah ditetapkan. diterapkan di 7 provinsi Jawa-Bali sejak 11 Januari 2021. Spread rate yang tinggi. Kebijakan saat ini meliputi 75% WFO untuk departemen yang tidak penting dan 100% WFO untuk departemen yang diperlukan, yang dapat menampung hingga 50% tempat ibadah. dan seluruh KBM. Yang ketiga menerapkan PPKM Mikro di Surabaya per 22 Juli 2021, jadi semua kegiatan dibatasi jam 20.00 WIB. Keempat, PPKM Mikro ditebalkan dan kebijakannya untuk hari raya Idul Fitri Diadopsi setelah kenaikan dalam kasus Covid19, dan efektif per 22 Juli 2021, kebijakan tersebut mencakup kapasitas maksimal 25 orang di pagi hari, WFO dengan maksimal 25 kantor di zona merah, dan larangan beroperasi.

Masuknya tempat ibadah dan sekolah tatap muka di zona merah PPKM darurat, PPKM mulai berlaku pada 30 Juli 2021 di Bali, Jawa dan beberapa daerah di luar Jawa Bali. Aturan tersebut antara lain 100% WFH di industri non essential goods, hingga 50% WFO di industri essentials, pusat perbelanjaan tertutup, dan restoran/restoran yang hanya menerima takeout. Pemerintah kini resmi menggunakan istilah PPKM Level 4 dan diperpanjang pembatasannya hingga 25 Juli 2021. Di PPKM level 4, bagian basic department pengabdian masyarakat bisa menikmati hingga 50% WFO, dan office 25% dari pelayanan administrasi.

Daftar Pustaka

- Febrian, Ranggi Ade. (2016) Collaborative governance dalam pembangunan kawasan perdesaan (tinjauan konsep dan regulasi) Volume 2 No.2 <https://journal.uir.ac.id/index.php/wedana/article/view/1824> Diakses pada April 2021
- Goldsmith dan Donald, (2009:135-136). Commitment to a Common Purpose merupakan dasar sebuah network atau jaringan harus ada karena didalamnya ada kepentingan bersama tanpa mengabaikan kepentingan instansi masing-masing. Vol. 7 No. 1 (2021): Publika : Jurnal Ilmu Administrasi Publik, <https://journal.uir.ac.id/index.php/JIAP>. Diakses pada April 2021
- Denny Irawan. (2017), Collaborative governance (Studi Deskriptif Proses Pemerintahan Kolaboratif Dalam Pengendalian Pencemaran Udara di Kota Surabaya) Volume 5, Nomor 3, September – Desember, <http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-kmp90388af27afull.pdf>. Diakses pada April 2021

Innes dan Booher, Healey, serta Gunton dan Day. *Perencanaan kolaboratif sudah berhasil dilaksanakan di beberapa negara misalnya untuk mengatasi kasus-kasus lingkungan, keamanan, pengelolaan air yang melibatkan banyak pemangku kepentingan, dan lintas daerah administratif.*

⁴ Moleong (2011: 331). *Analisis data model interaktif, dengan 3 (tiga) komponen analisisnya yaitu reduksi data, sajian data, dan penarikan simpulan atau verifikasi.* <https://eprints.uny.ac.id/18100/5/BAB%20III%2009.10.033%20Aji%20p.pdf>.

³ O'flyn dan Wanna. *Collaboration means joint working or working in conjunction with others. It implies actors—individuals, groups or organisations—cooperating in some endeavour.*

⁴ Purwanti, (2016:199). *Dinamika kolaborasi terdiri atas 3 (tiga) komponen, yaitu : Principled Engagement, Shared Motivation, Capacity for Join action.* Vol. II Nomor 1 Oktober 2016. <https://core.ac.uk/download/pdf/322502631.pdf>.

Suruni, Ahmad. 2018. *Collaborative Governance Sebagai Inovasi Kebijakan Strategi (Studi Revitalisasi Kawasan Wisata Cagar Budaya Banten Lama)*, Jurnal Humanika Vol. 25 No. 1, 2018 : 3-4 Tumengkol, A. R., (2015:107-108) *Kriteria keberhasilan sebuah network (jaringan) atau kolaborasi dalam governance*

¹¹ Farhaeni, M. *Kajian Penanganan Kasus Pandemi Covid-19 Di Desa Bondalem, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, Dan Bali Umumnya. COVID-19: Perspektif Hukum,* 21

¹ Putera, Roni Ekha dkk. (2020). *Collaborative Governance dalam Penanganan Penyebaran Kasus Corona Virus Disease-19 di Kota Padang*

⁹ Qalby, A. N. U. R., Pemerintahan, I., Ilmu, F., Dan, S., & Politik, I. (2018). *Collaborative governance dalam pengelolaan sampah di kelurahan paropo kecamatan panakkukang kota makassar (bank sampah pusat).*

Collaborative Governance Dalam Penanganan Pandemi Covid 19 Di Kota Surabaya (Study Kasus Di Kelurahan Kandangan)

ORIGINALITY REPORT

14%

SIMILARITY INDEX

13%

INTERNET SOURCES

1%

PUBLICATIONS

4%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repo.unand.ac.id Internet Source	3%
2	jurnal.uwp.ac.id Internet Source	2%
3	repository.unpar.ac.id Internet Source	2%
4	ejournal.ipdn.ac.id Internet Source	2%
5	journalmpci.com Internet Source	1%
6	letter.btp.ac.id Internet Source	1%
7	jurnal.umt.ac.id Internet Source	1%
8	dpm-ptsp.surabaya.go.id Internet Source	1%
9	ejurnal.unisri.ac.id Internet Source	1%

10

Submitted to UIN Raden Intan Lampung

Student Paper

1 %

11

digitalpress.ugm.ac.id

Internet Source

1 %

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On